

Judul : Agar tidak jadi beban baru, DPR: penertiban aset negara mesti bermanfaat bagi rakyat
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Agar Tidak Jadi Beban Baru

DPR: Penertiban Aset Negara Mesti Bermanfaat Bagi Rakyat

Senayan menyoroti keberhasilan Pemerintah mendapatkan kembali aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk kawasan eks Hotel Sultan. Upaya selanjutnya tidak boleh berhenti pada aspek hukum dan pengambilalihan aset semata.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Marinus Gea mengatakan, aset yang telah kembali kepada negara mesti benar-benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal yang lebih besar bagi masyarakat. "Pertanyaan yang harus dijawab Pemerintah berapa nilai aset yang berhasil diselamatkan, berapa potensi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan dan bagaimana rencana pemanfaatan kawasan tersebut ke depan," ujar Marinus di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) melaksanakan eksekusi pengosongan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 yang menjadi lokasi Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Eksekusi lahan dan bangunan senilai Rp 28,9 triliun ini dimohonkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), sementara PT In-

doBuildco sebagai pihak tergugat. Marinus melanjutkan, publik akan melihat proses penertiban aset hanya sebagai perpindahan kontrol apabila Pemerintah tidak mampu menunjukkan manfaat nyata pasca pengambilalihan. Karena itu, publik perlu mengetahui penjelasan secara komprehensif mengenai masterplan pengelolaan kawasan eks Hotel Sultan. Seperti proyeksi pendapatan, model pengelolaan baru, hingga kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta.

Dia mengingatkan, jangan sampai aset yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara justru tidak produktif dan menjadi beban baru bagi negara. "Harus ada roadmap (peta jalan) yang jelas mengenai bagaimana aset tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan memberikan manfaat publik," tandas politisi PDIP ini.

Menurutnya, perlu juga memperhatikan dampak sosial dari proses penertiban aset tersebut.



Marinus Gea

Pemerintah harus memperhatikan jumlah pekerja yang terdampak, status kontrak tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta keberlangsungan usaha tenant dan vendor yang selama ini bergantung pada aktivitas kawasan tersebut.

Marinus menilai, kasus eks Hotel Sultan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset negara secara nasional. Evaluasi tersebut mencakup aset-aset negara yang masa kerja samanya telah berakhir, aset yang kurang dimanfaatkan, maupun aset yang menghasilkan tingkat pengem-

balian yang rendah.

"Pemerintah tidak boleh terjebak pada narasi negara telah menang hanya karena memenangkan aspek hukum," kata dia menekankan.

Dia menambahkan, kemenangan hukum hanyalah output. Yang lebih penting adalah outcomenya. Seperti penerimaan negara meningkat, manfaat publik bertambah, dan kawasan tersebut menjadi lebih produktif. "Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya," tandasnya.

Ia menegaskan, fokus utama dalam kasus ini bukan sekadar pada eksekusi pengambilalihan aset, melainkan pada akuntabilitas pasca eksekusi. Keberhasilan Pemerintah dalam mengembalikan aset negara harus dibuktikan dengan meningkatnya nilai tambah ekonomi, sosial, dan fiskal yang dirasakan masyarakat.

"Jika tidak ada peningkatan manfaat publik, maka keberhasilan hukum Pemerintah hanya akan dipersepsikan sebagai kemenangan administratif, bukan keberhasilan dalam tata kelola aset negara," imbuh Marinus.

Lebih lanjut, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) melakukan audit terhadap aset-aset strategis negara yang bernilai tinggi. Pasalnya, DPR berkepentingan memastikan seluruh aset strategis negara dikelola secara profesional dan akuntabel. "Ini juga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan aset negara," tandasnya.

Senada, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo meminta Pemerintah tidak berhenti pada pengambilalihan aset eks Hotel Sultan di kawasan GBK, Jakarta. Penertiban harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aset negara di kawasan Senayan yang masih dikuasai pihak swasta meski masa pengelolanya telah berakhir.

Langkah tegas Pemerintah dalam mengambil alih lahan dan bangunan eks Hotel Sultan, kata Rudianto, harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penataan aset negara secara komprehensif. Karena masih terdapat sejumlah aset negara lain yang perlu ditinjau status pengelolannya. ■ TIF